

Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang di rubah dengan ketentuan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah.
- d. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah di tetapkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Hasil Survey Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI	69,1-69,5
		Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kerja sama yang difasilitasi X 100%	80 %
		Persentase usulan Daerah Persiapan Otonom yang di setujui DPRD Provinsi	Jumlah Daerah yang disetujui dibagi Jumlah Daerah yang diusulkan X 100%	75 %
		Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang disusun X 100%	90 %
		Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kemendagri	3.38
		Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum	Jumlah Produk Perundang-undangan yang dibentuk dan disebarluaskan serta implementasi HAM dibagi jumlah rancangan produk perundang-undangan yang diusulkan dan rencana Implementasi HAM x 100%	100 %
2	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan	Level Kematangan/Maturitas PBJ	Survey Maturitas PBJ	3

		Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	Prosentase penyelesaian bahan perumusan kebijakan umum, hasil koordinasi, monitoring dan fasilitasi administratif BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah.	90 %
		Persentase Perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang disusun X 100%	100 %
3	Terwujudnya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Efektif dan Efisien	Nilai Penguatan Organisasi	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.22
		Nilai Penataan Organisasi	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2.33
		Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,10
		Nilai Penataan Tata Laksana	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3.62
		Nilai Penguatan Akuntabilitas	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,74
		Nilai Manajemen Perubahan	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3.69
		Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif

		Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Hasil Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Keprotokolan berdasarkan PermenPAN&RB No 14 Tahun 2017	Baik
		Persentase Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah	Hasil perhitungan menggunakan pedoman KemenPAN dan RB	100 %

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Dr. H. IWA KARNIWA, SE, Ak, MM, CA, PIA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009